

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang nikah sirri ; nikah sirri dipandang sebagai pernikahan yang illegal, karena tidak ada satu katapun yang menyebut istilah nikah sirri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek*. Istilah nikah sirri atau nikah ‘*urfi* (adat) yang identik dengan nikah bawah tangan dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1), bahwa sahnyanya perkawinan dilakukan melalui pencatatan dan pengawasan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam perspektif Hukum Islam, nikah sirri cenderung diperbolehkan, karena dalam pelaksanaannya di Indonesia, dipandang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagai ketentuan mutlak dari sahnyanya akad nikah yang ditandai

dengan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul, akan tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai karena bersifat rahasia (sirri) dan belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama setempat sehingga mudah digugat dan dipalsukan.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Tinjauan *al-Maqashid al-Syari'ah* tentang nikah sirri dalam pandangan Hukum Positif di Indonesia ; Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan

ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami isteri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Perkawinan sirri yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negatif, baik kepada isteri, suami dan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Nikah sirri dipandang tidak sesuai dengan "*al-Maqashid al-Syar'iyah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, di antaranya : (1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), (2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, (3) Untuk kemaslahatan manusia, (4) Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya. Namun demikian, dilihat dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan bahwa praktek nikah sirri bukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak ditemukan pasal demi pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini dikenai sangsi hukum. Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi.

Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah sirri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan

nikah yang tidak memenuhi ketentuan *al-Maqashid al-Syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan klausul itu nikah sirri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif. Administrasi pencatatan perkawinan dengan melihat kepada kompleksitas yang selalu dijumpai di zaman sekarang ini, dengan kata lain bahwa nikah tanpa pengawasan dan pencatatan oleh pihak berwenang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak sah karena nikah tersebut membawa dampak negatif dan tidak tercapainya *al-Maqashid al-Syari'ah* yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Apabila terancam kemaslahatan untuk memelihara salah satu yang lima itu karena akibat nikah sirri, maka secara tak langsung telah bertentangan dengan tujuan hukum disyariatkan sehingga nikah sirri dapat saja dianggap tidak sah menurut hukum positif.

B. Saran-saran

Agar penelitian bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada para Pegawai Kantor Urusan Agama, penulis menyampaikan saran-saran agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibat hukumnya dan kemashlahatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1).